

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) DI DESA BOYONG ATAS KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Marcelino Yosua Keman¹, Olivia Lalamentik², Alzefin Y. R. M. Sinolungan³

^{1,2,3} Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

e-mail: Marcelinokeman02@gmail.com, oliviajose17@gmail.com,
alzefinsinolungan@unima.ac.id

Abstrak

Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan mencontohkan pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah dalam perencanaan program pembangunan di desa. Hal ini memastikan bahwa suatu program akan dikembangkan melalui inisiatif masyarakat, swadaya, dan gotong royong. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi masyarakat di Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan RKPDes bagi masyarakat. 2. Menyadari tantangan yang muncul selama partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta dan ciri khas suatu daerah secara sistematis, faktual, dan akurat. Hasil Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Di Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terdapat tiga indikator kesiapan masyarakat. Pemerintah diharapkan ikut serta dalam menyusun RKPDes guna merencanakan program-program yang dibiayai pemerintah di Desa Boyong Atas, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Ada tiga indikator partisipasi masyarakat dalam hal ini: (1) partisipasi masyarakat; (2) tata cara penyusunan RKPDes; (3) bentuk partisipasi pemerintah, atau faktor kecenderungan partisipasi dalam penyusunan RKPDes. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes sangat bergantung pada ketiga aspek tersebut.

Kata Kunci : Masyarakat, Partisipasi, Penyusunan RKPDES

ABSTRACT

Boyong Atas Village, Tenga District, South Minahasa Regency exemplifies the importance of community participation in assisting the government in development planning programs in the village. This ensures that a program will be developed through community initiatives, self-help, and mutual cooperation. Research Objectives 1. To find out how the community contributes in Boyong Atas Village, Tenga District, South Minahasa Regency in preparing the RKPDes for the community. 2. Be aware of the challenges that arise during participation. This study uses a qualitative research approach with a descriptive analysis approach to describe or describe the facts and characteristics of an area in a systematic, factual, and accurate manner. The results of the Analysis of Community Participation in the Preparation of Village Government Work Plans (RKPDES) in Boyong Atas Village, Tenga District, South Minahasa Regency, there are three indicators of community readiness. The government is expected to participate in the preparation of the RKPDes to launch programs funded by the government in Boyong Atas Village, Tenga District, South Minahasa Regency. There are three indicators of community participation in this regard: (1) community participation; (2) procedures for preparing the RKPDes; (3) the form of government restrictions, or the tendency factor for participation in the preparation of the RKPDes. The implementation of community participation in the preparation of the RKPDes is highly dependent on these three aspects.

Keywords: Community, Participation, Preparation of RKPDES

1. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan bangsa Indonesia adalah melindungi negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut serta dalam mengamankan dan melestarikan dunia, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan negara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi warga negaranya. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Republik Indonesia memuat Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kota. Komunitas perkotaan standar dan kota-kota juga disinggung sebagai komunitas perkotaan dalam arsip ini adalah unit regional yang sah dengan batas-batas regional yang mempertimbangkan pedoman otonom dan pengawasan organisasi pemerintah. Keistimewaan awal, kebebasan bersyarat, dan dorongan wilayah lokal membentuk alasan intrik wilayah lokal terdekat dalam kekuasaan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbaikan harus mencerminkan perubahan total di mata publik, tanpa mengabaikan persyaratan dan keinginan mendasar dari orang-orang dan pertemuan di dalamnya. Tahap pertama dan paling penting dalam pengembangan sesuatu adalah perencanaan, dan tingkat perencanaan yang dimiliki suatu negara sangat menentukan keberhasilannya. Oleh karena itu, kecerdasan, kemampuan, dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi (berpartisipasi) harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang dan kepentingan untuk membangun masyarakat. Agar pembangunan ini berhasil, orang harus dipertimbangkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertemu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) untuk membahas dan menyepakati program pembangunan desa. Perbaikan partisipasi merupakan upaya pelibatan daerah dalam menyusun kemajuan terkait kekayaan lingkungan hidup dalam rangka pemeriksaan musyawarah. Pembangunan tidak akan maju jika salah satu komponen pemerintah tidak menjalankan peran atau fungsinya. Untuk membangkitkan aspirasi, keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan atau keinginan masyarakat.

Masyarakat harus berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan partisipasi karena mereka adalah manusia dengan aspirasi tertinggi dan kesadaran terbesar akan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator karena masyarakat merupakan pemain utama dalam pembangunan. Hal ini akan membantu keberhasilan pembangunan desa dengan mendorong kegiatan masyarakat. Pembangunan di perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan lebih memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar ketahanan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan setiap desa dengan mengintegrasikan dan mencakup semua aspek masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, seluruh masyarakat perlu mengetahui keadaan dan berpartisipasi aktif. Apoda dan Melis, 2016).

2. Tinjauan teoritis

Landasan Teori

Menurut Saharuddin dan Sumarjo (2003), partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan individu dan kelompok dalam suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, partisipasi diperlukan dalam penanganan kasus untuk mengimplementasikan solusi yang sesuai, mengevaluasi hasil, dan menemukan solusi yang mungkin tidak terduga.

contoh partisipasi masyarakat antara lain menonjolkan "masalah dan potensi daerah", memutuskan cara memecahkan masalah, melakukan upaya pemecahan masalah, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. memeriksa modifikasi yang telah terjadi. Untuk memfasilitasi demokratisasi perencanaan pembangunan daerah, diperlukan partisipasi masyarakat. Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk menentukan bagaimana hidup dan mata pencaharian mereka diputuskan.

Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat harus berpartisipasi dalam perumusan tujuan bersama, pengambilan keputusan bersama, dan penciptaan ruang ekspresi dalam perencanaan dan perancangan pembangunan daerah.

Mengingat tugas dan kewajiban daerah setempat dalam mengatur, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengembangan di ruang mereka, Arnstein mendorong elaborasi atau tingkat dukungan.

Kawasan lokal yang dikembangkan sangat penting karena tanpa itu, masyarakat bisa menjadi sebuah artikel. Agar kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam segala hal mulai dari pengorganisasian hingga implementasi hingga pengamatan dan evaluasi kemajuan, mereka perlu dijadikan fokus perbaikan. Investasi yang signifikan dalam pembangunan adalah keahlian dan pengalaman penduduk setempat. Memberi masyarakat kesempatan untuk mempengaruhi arah kebijakan juga berarti memberi mereka kesempatan untuk membantu membentuknya.

Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

1. Sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas, data, rencana, dan teknologi merupakan contoh input.
2. Tentang pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan proses dari segi output atau tujuan keluaran, efisiensi, dan efektivitas.

Partisipasi masyarakat Jika disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan dibuat rencana atau program kerja pembangunan dengan menetapkan prioritas (diurutkan menurut kepentingannya) dan menempatkan program ke dalam tindakan. Pembangunan juga akan dilakukan secara efektif, dan rencana kerja pemerintah desa akan efektif. (Muhtardin, 2021).

Dalam hal keahlian, pengetahuan, kekuasaan, sistem, teknologi, dan sebagainya, pemerintah. Terutama seperti daerah setempat yang dianggap wajar memiliki pilihan untuk memberikan pekerjaan yang signifikan untuk dikembangkan, mengingat dalam hal mempersiapkan dan memberi ruang bagi kerja sama dan kemajuan daerah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat setempat dan pemerintah (pemerintah desa) dapat bekerja sama menuju pertumbuhan masyarakat desa. agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan desa dapat bersama-sama menangani isu pembangunan yang masih menjadi isu penting di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa melibatkan pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa. Pemerintah dan Masyarakat Desa bersinergi untuk kepentingan Masyarakat karena merupakan dua pihak yang harus ikut serta dalam Pembangunan Desa.

Perencana dan pelaksana hanya mengetahui bahwa keinginan masyarakat secara keseluruhan untuk mendukung program rekreasi mendorong pembangunan desa. dibuat oleh kota otoritas publik dengan semua targetnya adalah kerangka kerja yang tidak aktif. Semua hal yang sama, perbaikan kota harus menjadi organisasi antara daerah setempat dan pemerintah kota dalam kerangka perbaikan elektif. Kedua, untuk mengubah dinamika pembangunan masyarakat, pemerintah harus mengubah cara pandang terhadap pembangunan desa. Setiap masyarakat harus memandang pembangunan desa sebagai kewajiban moral, dan pemerintah desa harus menghormati tradisi dan asal-usul lokal. Sebagai bentuk dinamika masyarakat yang berperan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri, pemerintah desa harus terbuka terhadap kritik dan pandangan alternatif dari masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa harus menghormati anak bangsa yang menonjolkan kekurangan pemerintah dalam pembangunan. 2021) Muhammad

Teori Sumber Daya Manusia

Dalam Handayani (2006), Seolah menjadi "model baru" yang sesuai dengan semua proyek dan kebijakan yang diajukan, Histiraludin menyatakan bahwa partisipasi merupakan kata terpenting dalam setiap program pengembangan masyarakat. Dalam perkembangannya sering diucapkan dan dituliskan berulang-ulang, namun karena tidak dipraktikkan cenderung kurang penting. sejalan dengan sumbangan makna atau siklus pemerolehan, pengorganisasian, penguraian, dan tindakan bersama.

Menurut Slamet (2003), Valderama dalam konspirasi Arsito mengidentifikasi tiga bentuk partisipasi, khususnya yang terkait dengan pembentukan masyarakat demokratis:

Berikut adalah uraian tentang partisipasi kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat:

Partisipasi Sosial Pada setiap tahap siklus proyek pembangunan dari analisis kebutuhan hingga evaluasi, pemantauan, evaluasi, dan implementasi para dermawan atau pemangku kepentingan di luar proses pembangunan dikonsultasikan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Orang yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial juga belajar dan menjadi lebih aktif secara sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial, bukan kebijakan publik itu sendiri, adalah keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik global sebagai sarana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

Menurut agenda kebijakan publik, partisipasi warga berpengaruh pada bagaimana warga berpartisipasi secara langsung untuk proses pengambilan keputusan dan lembaga partisipasi sosial pemerintah. Komunitas pembangunan yang hanya berfokus pada komunitas itulah yang dimaksud dengan partisipasi. Menetapkan daerah setempat sebagai objek perbaikan sangat penting untuk memberdayakan mereka untuk mengambil bagian secara efektif dalam persiapan, pelaksanaan, pengamatan dan penilaian kemajuan. terutama jika pembayaran untuk pembangunan dilakukan dengan semangat lokal. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan setempat niscaya akan memberikan kontribusi yang signifikan. Masyarakat membawa kekayaan pengetahuan dan pengalaman untuk proses pembangunan.

Sulitnya pembangunan desa ditunjukkan oleh budaya Indonesia yang sangat mendukung tawaran tujuan bersama. Partisipasi non fisik berupa gagasan, saran, atau tanggapan terhadap kepentingan pembangunan, maupun partisipasi fisik berupa tenaga dan dana merupakan contoh berbagai bentuk partisipasi dalam masyarakat yang dapat dilihat bentuk kemandirian masyarakat.

Kapasitas wawasan masyarakat dalam mengembangkan ide-ide pembangunan dan berbagai sumber daya, seperti waktu aktif, tenaga dan uang, dapat membantu proses mewujudkan partisipasi masyarakat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, pengoptimalan semacam ini digunakan saat orang tidak memiliki peluang pribadi karena terlalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri, tidak memiliki cukup orang atau uang, atau tidak keduanya karena tidak memiliki cukup uang atau pendidikan

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	peneliti	Judul	Variable	Metode	Hasil
1.	Martiana Dwi Rahayu	Partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan di Desa sinari Kecamatan kalirajo Kabupaten Lampung Tengah	Partisipasi dalam Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinari Kecamatan Kalirajo Kabupaten Lampung Tengah	Deskriptif kualitatif menggunakan pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi	Tempat penelitian dan proses pengumpulan data saat di lapangan sehingga akan menghasilkan yang berbeda
2.	Megawati (2008)	Partisipasi Masyarakat dalam bentuk pembangunan (studi kelurahan Jakarta Selatan)	partisipasi Masyarakat dalam bentuk pembangunan studi kelurahan di Jakarta selatan	Bersifat dialogis berbasis kemitraan pada Pemerintah dan Masyarakat	Keterlibatan mental/emosi nal kontribusi dan tanggung jawab dalam Pembangunan
3.	Hendrik (2013)	Partisipasi masyarakat upaya bentuk pembangunan	Partisipasi masyarakat upaya bentuk pembangunan	Penelitian Pembangunan melakukan metode fisik	Perencanaan ,pelaksanaan dan pengawasan

	kecamatan bontomatene	kecamatan bontomatene kepulauan Selayar	dan non fisik dapat dilihat dari Masyarakat aktif secara menyeluruh dalam pembangunan	
4. Andi (2013)	Partisipasi masyarakat upaya bentuk pembangunan kecamatan bontomatene	Partisipasi masyarakat upaya bentuk pembangunan kecamatan bontomatene Kepulauan Selayar	Mengetahui Tingkat Partisipasi dalam Pembangunan	Pengumpulan data dilakukan secara survei wawancara observasi dan kuesioner

3. Metode

Fakta dan karakteristik suatu wilayah dipaparkan dalam penelitian ini secara sistematis, akurat, dan faktual baik dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maupun pendekatan analisis deskriptif. Sugiyono (2014) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode positivisme yang menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk melihat kondisi alam secara objektif. Yang ingin saya sampaikan lebih lanjut dalam survei ini: Warga Desa Boyong Atas di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, turut andil dalam pembuatan RKPDES ini. Sumber informasi akan menjadi jenis informasi penting dan tambahan.

- 1) Informasi yang dikumpulkan langsung dari responden disebut data primer. Melalui observasi, informasi, atau wawancara, warga Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan memberikan data primer untuk penelitian ini.
- 2) Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber lain dan dapat membantu penyebaran informasi yang berasal dari wawancara langsung dengan responden.

4. Hasil dan pembahasan

Letak Geografis

Desa boyong atas adalah desa di mana secara geografis terletak di daerah dataran tinggi di lereng gunung lolombulan pada ketinggian 600", M di atas permukaan laut. memiliki kondisi fisik tanah miring antara 10" – 60", memiliki cuaca rata-rata temperatur antara 25s/d 30°C. Desa boyong atas kecamatan tengah kabupaten minahasa selatan memiliki jumlah penduduk 1.238 jiwa dengan jumlah laki-laki 641 jiwa sedangkan perempuan 597 jiwa:

Adapun batasan wilayah desa boyong atas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan perkebunan rakyat

Sebelah Selatan: berbatasan dengan gunung lolombulan

Sebelah Barat: berbatasan dengan perkebunan PTPN XIV, perkebunan

Sebelah Timur: berbatasan dengan desa pakure tiga

Berdasarkan pembahasan hasil analisis, bahasan yang berisi hasil Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Di Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat 3 (tiga) indikator kesiapan masyarakat dan pemerintah di harapkan untuk mengikuti partisipasi dalam proses penyusunan RKPDES, agar dapat melancarkan program-program yang di terapkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini terdapat 3 indikator partisipasi masyarakat yaitu (1) partisipasi masyarakat (2) proses penyusunan RKPDES (3) bentuk partisipasi pemerintah, Faktor Kecenderungan partisipasi dalam proses penyusunan RKPDES. Pada 3 faktor ini sangatlah penting di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDES.

Dalam studi ini, peneliti membentuk kelompok masyarakat dan pemerintah, kemudian memberikan daftar pertanyaan terbuka yang sukarela dijawab oleh para peserta. Berdasarkan hasil pemantauan, peneliti menganalisis situasi, keterangan, dan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) di Desa Boyong Atas, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil analisis ini memberikan informasi tentang kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam lingkungan desa terkait partisipasi dalam penyusunan RKPD. Setelah melakukan wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung ditemukan bahwa terdapat tiga indikator yang belum optimal. Peneliti kemudian memilih enam informan data wawancara dari populasi yang kurang proporsional, yaitu tiga dari pihak pemerintah desa dan tiga dari masyarakat desa. Wawancara dan observasi dilakukan selama empat minggu pada waktu dan jam yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini bersifat deskriptif dalam arti menarasikan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Guna mempermudah dan memperlancar pengumpulan data, maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung kepada responden dan kemudian di analisa. Analisa di fokuskan pada 3 (tiga) indikator yaitu (1) partisipasi masyarakat dan pemerintah (2) proses penyusunan RKPD (3) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

1.Indikator Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah

Salah satu faktor penentu keberhasilan infrastruktur dan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan (RKPD). Sebab, setiap kebijakan harus memperhatikan keinginan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan RKPD merupakan bagian penting dari proses tersebut.

2.Indikator tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

Partisipasi masyarakat Dalam (RKPD) di laksanakan dengan 3 (tiga) tahap yaitu: (1) perencanaan adalah merencanakan berbagai macam-macam program dan di sahkan bersama baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat dalam pengolahan lingkungan (2) tahap pemanfaatan adalah sesuai perencanaan yang telah di tetapkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya (3) tahap pengawasan dan pengadilan perencanaan adalah pengawasan dan pengadilan dalam pemanfaatan sampah dan pengelolaan lingkungan di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat sesuai sifat pekerjaannya.

3.Indikator Bentuk Partisipasi Masyarakat

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Dalam kebanyakan kasus, program pengembangan masyarakat, termasuk bagaimana menggunakan sumber daya lokal dan mengalokasikan dana, selalu diputuskan oleh pemerintah pusat. Hal ini seringkali mencerminkan keinginan dan kebutuhan segelintir elit penguasa daripada banyak komunitas. Melalui landasan musyawarah yang memberdayakan masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara langsung dalam siklus dinamis terkait dengan program-program perbaikan di tingkat wilayah atau lingkungan, dukungan masyarakat setempat yang dikembangkan perlu digalakkan.
- b. Sebaliknya, lapisan atas, yang biasanya terdiri dari orang-orang kaya, tidak menuntut kontribusi yang proporsional karena dalam banyak hal menerima manfaat yang lebih besar dari hasil-hasil pembangunan. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka peran serta masyarakat dalam membina dan mengevaluasi pembangunan sangatlah penting. Partisipasi masyarakat juga memberikan umpan balik terhadap isu dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek atau program pembangunan. Oleh karena itu, perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan informasi tentang perubahan kegiatan dan perilaku aparaturnya pembangunan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.

5. Kesimpulan dan Saran

1) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Pemerintah pusat biasanya menentukan setiap program pengembangan masyarakat, termasuk bagaimana menggunakan sumber daya lokal dan mengalokasikan dana. Hal ini sering kali mencerminkan keinginan dan persyaratan dari elit penguasa kecil daripada masyarakat umum. Melalui landasan musyawarah yang memberdayakan masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara langsung dalam siklus dinamis terkait dengan program-program perbaikan di tingkat wilayah atau lingkungan, dukungan masyarakat setempat yang dikembangkan perlu digalakkan.

2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Kesediaan sejumlah besar penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, lapisan atas, yang biasanya terdiri dari orang-orang kaya, tidak menuntut kontribusi yang proporsional karena dalam banyak hal justru menerima manfaat yang lebih besar dari hasil-hasil pembangunan.

4) Partisipasi dalam pemantauan evaluasi

Selain membina dan mengevaluasi program dan proyek pembangunan untuk memastikan tercapainya tujuan yang dimaksud, kegiatan pembangunan memerlukan umpan balik terhadap isu dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan dimaksud. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendata kegiatan pembangunan dan perilaku aparatur.

Berdasarkan permasalahan yang dialami selama penelitian tentang Dukungan Daerah dalam Kesiapan Rencana Kerja Pemerintah di Kota Boyong Atas, Daerah Tengah, Rejim Minahasa Selatan, diajukan gagasan sebagai berikut:

- 1) Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Desa Boyong Atas Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan harus dilakukan perbaikan perencanaan masyarakat dan pemerintah. Untuk mewujudkan setiap program pemerintah di Desa Boyong Atas, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama. Masyarakat khususnya yang terlibat dalam pemerintahan desa di Boyong Atas juga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan.
- 2) Program-program Rencana Kerja Pemerintah harus disosialisasikan secara luas dan pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Masyarakat harus lebih aktif dan berinisiatif dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membantu membangun desa tanpa menunggu arahan dari pemerintah desa. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan sosial atau mengolah sumber daya dan potensi desa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Indrayani, N. A., & Setiawina, N. D. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik. Bandung:
- Melis, Apoda, & Abd., A. M. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kabupaten Konawe Utara. Jurnal Ekonomi (Je) Vol .1 (1, 99-115).
- Muhtardim. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalea Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020.
- Ngongano, Y., & Tinggogoy, D. C. (T.Thn.). Peran pemerintah Desa Dalam Pembangunan.
- Rahmah, R. S. (2018). Kontribusi Industrialisasi Pedesaan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa.

- Sombang, N. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten minahasa (Utara).
- Sugiyono(2011),Metode Penelitian Administrasi.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi
- Lestari, S.M., Wahyuningsih, Y. E. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES)(10), 1254-1261.
- Cristian,H.(2015).tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai: eJournal Pemerintahan Integratif